

Indonesia Pimpin Divisi Pakar Penamaan Geografi

Jakarta - Dalam pertemuan ke-13 tingkat divisi United Nation Group of Experts on Geographical Names, Indonesia mendapat giliran mengepalai bagian Asia Tenggara dan Pasifik Tenggara. Demikian diungkapkan Titiek Suparwati, seorang panitia dari Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional) kepada *SH*, se usai pertemuan yang berlangsung pekan lalu.

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi penamaan geografi di Indonesia saat ini diungkapkan Alex Retraubun, Direktur Pengelolaan Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Banyaknya pulau yang belum dinamakan sekarang ini menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Ini bagian dari upaya mempertahankan pulau-pulau di perbatasan setelah kasus Sipadan dan Ligitan terjadi. Kedua pulau tersebut dikuasai Malaysia setelah Indonesia dinyatakan pengadilan internasional tidak berhak karena tidak mengelolanya.

Retraubun menjelaskan dari 17,504 pulau di Indonesia sekitar 9.634 pulau atau lebih dari setengahnya belum dinamai. Selain penamaan yang merupakan bagian dari toponimi, penghitungan jumlahnya saja sudah menunjukkan adanya masalah.

Namun, data jumlah pulau tanpa nama dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), data dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Bakosurtanal, serta Departemen Dalam Negeri (Depdagri) semuanya memberikan angka yang berbeda. Menurut LIPI 6.127 pulau belum ada nama, TNI menyebutkan 5.707 pulau tanpa nama, sedang Bakosurtanal keluar dengan angka 6.489 pulau termasuk didalamnya 374 pulau pada aliran sungai. Dan data 9.634 pulau tanpa nama berasal dari Depdagri.

Variabel data ini disebabkan metode pencatatannya yang berbeda-beda. Ada yang melalui korespondensi, ada yang melalui survei citra satelit. Kemudian ada permasalahan yang ditimbulkan akibat nama yang digunakan sama untuk beberapa pulau dalam satu provinsi. "Contohnya Pulau Dana di Nusa Tenggara Timur," tulis Retraubun dalam makalahnya.

Tanggung jawab toponimi sendiri mencakup produksi peta. Kota Makassar yang sudah berubah-ubah dari nama itu ke Ujung Pandang dan kembali lagi memiliki konsekuensi pada pembuatan peta yang juga harus terkini (*update*). Artinya pula para pembuat peta regional yang bukan saja dari Indonesia pun terkena imbas untuk mengubah namanya lagi.

Sukendra Martha, Sekertaris Umum Bakosurtanal menjelaskan bahwa kepercayaan sebagai pimpinan divisi itu artinya minimal Indonesia memang musti menyiapkan diri secara organisasi karena ini untuk tiga atau empat tahun. Ia menjelaskan bahwa sampai sekarang penetapan penamaan ini masih menunggu perpres otorisasi penamaan geografi yang diajukan oleh Depdagri dibawah .Diretur Jendral Pemerintahan Umum, Dr Sojuangun Situmorang.

Posisi Indonesia sebagai pimpinan divisi ini diharapkan juga dapat memberikan kekuatan untuk mendorong ketetapan penamaan baru di wilayah Indonesia ini bisa diterima oleh pihak asing. Dengan demikian, peta-peta produksi luar negeri tidak lagi memiliki penamaan geografi berbeda dengan peta dalam negeri kita. (adiseno)